

Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Program Urban Farming di Kabupaten Gresik

Muhammad Nuri Shobry

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

ABSTRACT

Along with the development of industries in Indonesia are shifting agricultural land and the problem of food security, the Government of Indonesia encouraged a bureaucratic reform program with the law number 8 in 2012 about efforts embody the sovereignty of the national food security. One of the policies formulated by the Government is a system of agricultural extension, fisheries and forestry, and programs that can answer these problems is Urban farming that aims to empower communities through empty land use carried out by the implementing Agency Outreach agriculture, fishery and forestry in Gresik over duties and authorities listed in Regent regulations to assist the Regent in organizing outreach in the field of agriculture. Look at the condition of the locality in Gresik who experienced development of the industry and the amount of land that occurs over the function, then the purpose of this research is to illustrate and describe the policy implementation of Urban farming in Gresik Regency. The research was carried out using model theory policy implementation from George C. Edward III combined with theory of Van Horn and Van Meter using five variables or ffaktor the memepengaruhi implementation i.e. communication, resources, disposition, bureaucratic structure and economic, social and environmental poitik (support target group). This research uses qualitative descriptive approach with determination of informants are purposive. The data obtained from the interview process. The results of study showed that Urban farming policy implementation carried out by the implementing agency for agricultural extension, fisheries and forestry in Gresik is not going well and the maximum. It can be seen from the presence of the stages of the process of implementation has not been going well and some of the variables that affect implementation also is still not effective, as in subsection variable communication, resources and support target groups that are not yet well-organized and effective.

Keywords: policy implementation, urban farming, society empowerment, land use.

Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai negara agraris, yang memiliki potensi kekayaan sumberdaya alam yang besar tentunya sangat mengandalkan sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang majemuk dan tersebar di beberapa daerah maupun pulau. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa secara langsung maupun tidak langsung, kebutuhan pangan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Kenyataan yang pernah dialami negara Indonesia pada Tahun 1984, bahwa Indonesia yang telah mencapai swasembada beras bukanlah jaminan untuk terjadinya kesinambungan ketersediaannya di masa depan. Hal ini terbukti dengan adanya fakta yang terjadi pada tahun-tahun terakhir ini bahwa gangguan iklim dan perubahan orientasi pembangunan ekonomi di Indonesia menjadikan Indonesia kembali menjadi negara pengimpor beras.

Permasalahan ketahanan pangan merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu negara. Untuk itu, seluruh komponen bangsa baik itu pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama

membangun ketahanan pangan nasional. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pangan yang menyebutkan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab mewujudkan ketahanan pangan. Fenomena ekspansi sektor industri inilah yang akan mendorong proses transformasi perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri. Dari sektor industri ini juga masyarakat khususnya petani dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya. Proses ini akan selalu terjadi sampai pada tingkat upah atau gaji sektor pertanian hampir sama dengan sektor industri. Namun yang terjadi pada negara Indonesia yaitu semakin banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih mementingkan pada adanya proteksi terhadap sektor industri.

Data yang dimiliki oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian menyatakan, potensi sumber pangan yang dimiliki Indonesia cukup banyak, yaitu 77 jenis sumber karbohidrat, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayur-sayuran, dan 110 jenis rempah. Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia sebenarnya merupakan negara yang kaya akan biodiversitasnya.

Ironisnya, dalam indeks ketahanan pangan Indonesia berada di urutan 64 jauh di bawah Malaysia (33), China (38), Thailand (45), Vietnam (55) dan Filipina (63). Hal itu juga menggambarkan bahwa Indonesia justru mengalami permasalahan di sektor ketahanan pangan.

Hal ini diprediksi akan terus memburuk dengan terus bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Di masa depan diprediksi akan terjadi kelangkaan pangan yang diakibatkan oleh beberapa hal seperti kerusakan lingkungan, konversi lahan, tingginya harga bahan bakar fosil, pemanasan iklim dan lain-lain. Fenomena industrialisasi ini menyebabkan luas lahan pertanian produktif menjadi semakin sempit karena terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan industri, pembangunan pemukiman, infrastruktur jalan dan lain-lain. Dengan adanya proteksi terhadap sektor industri tersebut, menjadikan semakin banyaknya masyarakat petani yang lebih memilih untuk meninggalkan pekerjaan sebagai petani dan lebih memilih pada sektor industri.

Gresik merupakan daerah yang memiliki lahan pertanian subur dengan pertanian dan perikanan, tapi juga tidak terlepas dari bidikan industri-indutri besar untuk dijadikan bangunan sektor industri disana. Sekarang Kabupaten Gresik merupakan salah satu pusat kawasan industri terbesar di Jawa Timur. Dilihat dari PDRB tertinggi yang dihasilkan oleh kabupaten Gresik yaitu dari sektor industri, sehingga masyarakat luas banyak

mengenal Gresik sebagai kota industri. Konversi lahan pertanian dan perikanan yang berubah menjadi kawasan industri besar-besaran di Gresik ini mendapat banyak perhatian serius dari pemerintah setempat agar tidak terlalu di eksploitasi tanpa adanya upaya pengendalian dan penanggulangannya.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Gresik tahun 2013, di wilayah Gresik sendiri kontribusi dari sektor pertanian dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berada di posisi ketiga dibawah sektor industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2012. Sektor pertanian pada tahun ini hanya menyumbang 8,88% PDRB kabupaten Gresik, berbeda dengan sektor industri yang menunjukkan trend positif dengan menyumbang 50,23% dari total keseluruhan PDRB. Meskipun pertanian sedikit menunjukkan kenaikan sumbangan PDRB dari tahun sebelumnya, namun kontribusinya masih terlalu rendah dibanding dengan sektor lain. Pada kasus ini menunjukkan jika sektor industri lebih banyak diminati oleh para pekerja daripada sektor pertanian, dan menyebabkan sektor pertanian akan ditinggalkan karena lebih memilih sektor industri yang dapat memberikan penghidupan yang lebih layak bagi masyarakat.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat yang terjadi di Kabupaten Gresik ini akan menuntut masyarakat untuk membangun berbagai infrastruktur yang dapat menunjang kebutuhannya, dan ini dapat mengakibatkan permintaan akan lahan pertanian menjadi cukup besar. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Gresik berdasarkan sektor atau bidang kehidupannya dapat dilihat dari tabel mengenai Pertumbuhan Ekonomi tahun 2011-2012 berikut ini.

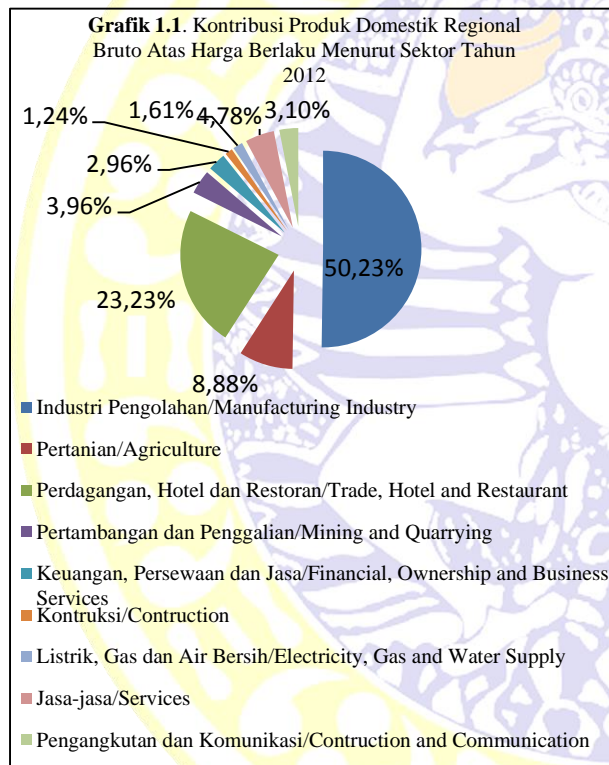
Tabel. I.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2011-2012 (Persen)

No	Sektor / Sub Sektor	2011	2012
1	Pertanian	2,99	3,03
2	Pertambangan dan Penggalian	12,07	12,46
3	Industri	5,97	5,99
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	9,69	9,76
5	Konstruksi	9,60	9,65
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,35	11,07
7	Pengangkutan dan Komunikasi	7,57	7,22
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,05	7,44
9	Jasa-jasa	6,95	6,95
Jumlah PDRB		7,39	7,43

Sumber: BPS Kabupaten Gresik 2013 (data diolah)

Dari data tabel tentang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian sangat buruk dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, dimana sektor pertanian hanya mencapai 2,99% pada tahun 2012 dan 3,03% pada tahun 2013. Nilai ini sangat jauh bila dibandingkan dengan sektor pertambangan dan penggalian yang bisa mencapai 12,46% pada tahun 2013. Sama halnya untuk laju pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya itu sendiri sektor pertanian hanya meningkat dengan 0,04% dari tahun sebelumnya.

Tingkat kontribusi beberapa sektor perekonomian di Kabupaten Gresik dapat dilihat dari data grafik mengenai grafik kontribusi Produk Domestik Regional Bruto atas harga tertentu berdasarkan sektor, berikut ini.



Sumber: BPS Kabupaten Gresik 2013 (data diolah)

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Gresik masih lemah hanya dengan menyumbang 8,88% dari keseluruhan kontribusi PDRB Gresik, sedangkan di tingkat kontribusi tertinggi terdapat sektor industri yang menguasai perekonomian daerah Gresik. Selanjutnya ada sektor perdagangan, hotel dan restoran yang juga mengalahkan sektor pertanian dengan kontribusinya yaitu 23,23%.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat yang terjadi di Kabupaten Gresik ini akan menuntut masyarakat untuk membangun

berbagai infrastruktur yang dapat menunjang kebutuhannya, dan ini dapat mengakibatkan permintaan akan lahan pertanian menjadi cukup besar. Dampaknya banyak lahan pertanian dan perikanan di daerah kota maupun pinggiran Gresik yang nantinya akan beralih fungsi menjadi industri, perumahan dan lainnya sesuai kebutuhan yang diminta. Berkaitan dengan hal itu, konversi lahan yang terjadi dapat disebabkan oleh kurangnya insentif bagi para petani dan perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian, sehingga masyarakat beralih ke sektor industri yang dinilai lebih menguntungkan.

Untuk itu perlu adanya suatu kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah dalam upaya mengatasi permasalahan konversi lahan yang menjadi tantangan berat yang dihadapi pemerintah agar sektor pertanian di Kabupaten Gresik masih tetap tumbuh dan berkembang. Kebijakan merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu dan memiliki batasan kewenangan dan aktor pelaksana kebijakan dalam mengatasi dan menyikapi suatu keadaan tertentu. Kebijakan untuk menghadapi keseluruhan permasalahan yang terjadi dengan mewujudkan keadilan dan kemakmuran, serta kebijaksanaan atas segala permasalahan (menghilangkan berbagai macam hambatan). Bagi masyarakat pengendalian konversi lahan tersebut hanyalah merupakan suatu langkah dalam rangka penciptaan iklim yang baik bagi keberlangsungan ketahanan pangan dan juga perkembangan ekonomi di daerah Gresik. Hal ini merupakan sedikit gambaran tentang implementasi kebijakan atau pelaksanaan program.

Berbicara mengenai program, maka salah satu bentuk kebijakan atau program yang dirumuskan oleh pemerintah adalah Program *Urban farming*. Istilah *urban farming* sendiri pada awalnya hanya digunakan dalam bahasa akademisi dan juga media massa, tapi kini telah diakui oleh berbagai lembaga di bawah PBB, seperti UNDP dan FAO sebagai suatu kajian ilmu dan teori. *Urban farming* diartikan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan pertanian yang dilakukan di dalam kota (intraurban) dan pinggiran kota (periurban) untuk dapat memproduksi, mengolah dan mendistribusikan beragam produk pangan, dengan menggunakan kembali sumberdaya alam, manusia dan material serta produk atau jasa yang diperoleh dari dalam dan sekitar daerah urban, dan pada nantinya digunakan untuk memasok sebagian dari sumberdaya alam, manusia dan material serta produk atau jasa ke daerah urban tersebut. (Smith, et.al., 1996:43-57).

Urban farming ini memang dapat bersifat kontradiktif, dikarenakan pertanian yang selalu

bertolak belakang dengan pembangunan dan industrialisasi yang gempar terjadi di daerah perkotaan. Namun *urban farming* ini mendapat dukungan penuh dari FAO (Food and Agriculture Organization) sebagai suatu strategi yang dapat membantu kebutuhan pangan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. FAO kini telah memposisikan *urban farming* sebagai salah satu sumber pasokan pangan dan salah satu opsi ketahanan pangan untuk masyarakat, karena hal ini merupakan cara produktif dalam memanfaatkan adanya ruang terbuka kosong maupun lahan non-produktif (kering) di perkotaan, dan ini juga dapat menjadi sumber pendapatan dan kesempatan kerja lain bagi penduduk kota.

Program *urban farming* yang ada di Gresik ini merupakan salah satu program yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K). BP4K merupakan penyelenggara penyuluhan dan unsur teknis operasional pemerintah daerah di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang menunjang program-program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Gresik ini terbentuk berdasarkan payung hukum atau dasar hukum kebijakan pemerintah yang tertera pada pasal 8 ayat (2) huruf A Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik nomor 49 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik tanggal 29 Desember 2010. Pada Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan di Kabupaten Gresik juga menyebutkan mengenai struktur dan ketentuan Unit Pelaksana Teknis atas Badan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah ini. Dimana didalamnya disebutkan bahwa Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan bertugas memimpin, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan memberikan pembinaan teknis dan administrasi penyelenggaraan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerjanya.

Program ini diterapkan untuk menjawab persoalan perkembangan industri yang terjadi di Gresik. *Urban farming* berdasarkan pemahaman dan penerapan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) merupakan aktivitas pertanian di dalam atau sekitar perkotaan yang melibatkan ketrampilan, keahlian dan inovasi dalam budidaya dan pengolahan

makanan. Hal utama yang menyebabkan munculnya aktivitas ini adalah upaya memberikan kontribusi pada ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan kosong, menambah penghasilan masyarakat sekitar juga sebagai sarana rekreasi dan hobi.

Program *urban farming* di Gresik sudah berjalan sejak tahun 2014 dengan beberapa kegiatan yang telah dijalankan dan mencetak hasil beberapa komoditi pertanian pangan dan juga pertanian yang lumayan bagus dan berhasil. Misalnya pada tahun 2014 telah banyak kegiatan pertanian produksi tanaman pangan yang telah terealisasi, antara lain kegiatan penanaman dan pembibitan jahe merah, cabe, terong, tomat, petsai atau sawi, dan lainnya.

Dari paparan latar belakang diatas, peneliti memfokuskan riset ini pada kajian pelaksanaan program *urban farming*. Bagaimana jalannya program ini dan apakah telah mencapai keberhasilan atau tidak selama dilaksanakannya program serta faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program *urban farming* di Kabupaten Gresik oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun lokasi penelitian ini pada aktor-aktor anggota Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris umum, Sub Bagian Program, Kepala Jabatan Fungsional, dan Fungsional atau tim penyuluh di lapangan serta Ketua Kelompok Kerja Binaan Bapeluh atau sebagai masyarakat. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling dengan menunjuk langsung pada 7 narasumber yang dianggap paling mewakili.

Sedangkan strategi yang digunakan di dalam penelitian adalah fenomenologi, yaitu mencoba mengungkap pengertian/makna esensial terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu yang diteliti berdasarkan fenomena (yang telah mereka alami, maupun yang ditemukan selama penelitian) dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan menggunakan alat perekam, catatan tertulis, dan juga literatur atau dokumentasi yang terkait (Moleong, 2000:135). Sementara teknik pemeriksaan dan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi, yaitu dengan memeriksa derajat kesamaan antara data hasil pengamatan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan. (Moleong, 2002:178).

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Program adalah pelaksanaan program dan penggunaan strategi yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi dan pribadi dalam hal ini masyarakat dalam menjalankan proses setelah program itu dirumuskan. Disini akan terlihat apakah program tersebut menghasilkan output seperti tujuan dan sasaran yang dikehendaki sebelumnya.

Menurut Van Horn dan Van Meter implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh publik dan individu-individu pribadi atau kelompok yang ditujukan untuk pencapaian sasaran yang sebelumnya telah terlebih dahulu ditetapkan. Termasuk dalam aktivitas ini adalah usaha untuk mentransformasikan keputusan program ke tahap operasional dan usaha untuk mencapai perubahan besar maupun kecil. Pada dasarnya pelaksanaan program memuat suatu proses tindakan administrasi dan politik. Proses administrasi dapat ditunjukkan melalui bagaimana peran dari para aktor baik internal atau eksternal yang terlibat dalam program untuk menciptakan suatu sistem, struktur, prosedur dan aturan-aturan untuk melaksanakan program dalam upaya mencapai tujuan.

Pada program *urban farming* yang dirumuskan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa karakteristik masing-masing aktor merupakan elemen kunci yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program. Langkah awal dapat ditunjukkan dengan penentuan bagaimana dan siapa saja aktor yang terlibat dalam program *urban farming* ini. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor yang terlibat disini yaitu Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan itu sendiri sebagai aktor utama pelaksana program. Kemudian menggandeng dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, TP PKK Kabupaten Gresik dan dinas lain yang terkait.

Sedangkan, dalam proses pelaksanaan program *urban farming* dibutuhkan adanya sistem, tahapan, struktur, prosedur dan aturan-aturan dalam melaksanakan program dalam upaya mencapai tujuan. Proses seperti inilah yang disebut sebagai usaha-usaha dalam mengadministrasikan atau menimbulkan akibat dan dampak nyata bagi masyarakat atau kelompok sasaran.

Berikut adalah tahapan pelaksanaan program *urban farming*.

Tabel I.2. Tahapan Pelaksanaan Program *Urban farming*

Tahapan	Penjelasan
Persiapan	- Pengumpulan informasi awal di masyarakat mengenai potensi sumberdaya dan kelompok sasaran kegiatan. - Koordinasi dengan Dinas Pertanian,

	PKK Kabupaten dan dinas terkait dalam penentuan kelompok sasaran dan lokasi kegiatan. - Pemilihan pendamping di lapangan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan
Sosialisasi	- Sosialisasi dilakukan terhadap masyarakat, Karang Taruna dan PKK. - Kegiatan ini untuk menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan kepada semua lapisan masyarakat secara umum dan khususnya pelaksana program <i>urban farming</i> dan kelompok sasaran yang dituju.
Perencanaan kegiatan	- Melakukan perencanaan bangun pemanfaatan lahan kosong, fasilitas umum, lingkungan sekolah dan lingkungan industri. - Membuat jadwal kegiatan <i>urban farming</i> secara sinergis dengan pihak terkait dengan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
Pelaksanaan kegiatan	- Strategi dasar pemberdayaan masyarakat, yaitu pembentukan penguatan kelompok masyarakat dan kelompok sasaran. - Pendampingan teknis di lapangan terkait program. - Pelaksanaan pendampingan melalui metode pelatihan dan kunjungan oleh penyuluh pendamping. - Berpedoman pada partisipatif dan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam pelaksanaan.

Sumber: Bapeluh Kabupaten Gresik 2014

Berdasarkan penjelasan tersebut sudah menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program *urban farming* ini, dilakukan berdasarkan sistem, prosedur dan aturan-aturan yang mengatur setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh para aktor program. Dan aktor pelaksana program utama disini telah diketahui adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik.

Dan untuk mengungkap keberhasilan pelaksanaan program *urban farming* itu, dibutuhkan adanya indikaotor-indikator atau faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program agar dapat diketahui seberapa berhasilkah program yang telah dijalankan dalam setiap aspek yang ada. di dalam faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu program terdapat indikator-indikator didalamnya yang termuat seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari seorang pembuat program kepada pelaksana program (implementor). Komunikasi yang berjalan efektif akan menciptakan kesamaan pandangan dan pemikiran antara pembuat dan

pelaksana program mengenai arti, maksud, tujuan dan sasaran dari program yang akan dilaksanakan. Informasi program ini disampaikan kepada para pelaksana program agar mereka dapat mengetahui arti, maksud, tujuan dan arah program serta kelompok yang menjadi sasaran program, sehingga dapat mempersiapkan dan merencanakan program agar dapat diimplementasikan dengan benar sesuai tujuan yang diharapkan.

Komunikasi pelaksanaan program ini dibagi dalam berbagai macam dimensi penilaian.

a. Transformasi

Dalam penelitian ini, dimensi transmisi dalam komunikasi akan harus disampaikan oleh pembuat program *Urban farming* kepada para pelaksana program yang ada di lapangan dan juga masyarakat Gresik yang menjadi kelompok sasaran program. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang menjadi aktor pembuat program akan memberikan informasi kepada implementor program terutama unit pelaksana teknis di lapangan dan masyarakat sekitar yang menjadi target groups.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam pelaksanaan program *urban farming* ini pusat informasi dipegang oleh jabatan teknis di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang menjadi stakeholder utama pembuat program. Dan untuk mendukung lancarannya arus informasi dari pembuat program kepada kelompok sasaran, maka informasi dijelaskan kepada para pelaksana program yang disini juga berasal dari Badan Pelaksana Penyuluhan namun diambil dari jabatan fungsionalnya sebagai tim penyuluh di lapangan yang dibantu oleh dinas terkait dan juga TP PKK Gresik. Kemudian untuk menjelaskan program ini kepada kelompok sasaran, para pelaksana atau tim penyuluh dan tim PKK melakukan proses sosialisasi program.

Komunikasi instansi secara internal maupun eksternal yang terkait dan antara instansi dengan sektor privat yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung juga berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pelaporan atas hasil program setiap usai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian kepada sektor privat atau perusahaan yang membantu melalui adanya CSR.

b. Kejelasan

Pada dimensi kejelasan ini menghendaki bahwa agar program yang ditransmisikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terikat langsung maupun tidak langsung terhadap program tersebut dapat diterima dengan jelas sehingga diantara mereka mengetahui dan

memahami apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari program tersebut.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya proses komunikasi yang berjalan secara intensif. Komunikasi yang dimulai dari penjelasan program oleh Kepala Badan beserta jabatan teknis di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kepada para tim penyuluh pertanian sebagai pelaksana program yang dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, yang hanya mampu memahami dan mengetahui informasi terkait program *urban farming* dengan baik. Para pelaksana program ini yang mengetahui proses awal perencanaan program, pembuatan strategi yang tepat untuk dijalankan sampai pada penerapan program di lapangan.

Adapun temuan lain dari kejelasan program yang ditransformasikan kepada kelompok sasaran ini dilakukan dimulai dengan tahapan sosialisasi kepada masyarakat. Para pelaksana mencoba memadukan gerak langkah dan persepsi mengenai arti, maksud dan tujuan program *urban farming* agar dapat diterima oleh masyarakat. Dengan adanya pelatihan dan pendampingan secara intensif kepada kelompok sasaran juga menjadikan proses komunikasi dan koordinasi berjalan tanpa adanya hambatan atau ketidaktahuan mengenai kejelasan program. Sehingga dapat dikatakan kejelasan komunikasi yang diperoleh oleh para aktor program yang terlibat ini cukup baik.

c. Konsistensi

Pada dimensi konsistensi ini menghendaki agar informasi atas program publik yang ada mengenai arti, maksud, tujuan dan sasaran ini konsisten atau tidak berubah-ubah sewaktu-waktu. Karena jika terjadi inkonsistensi informasi program yang diberikan kepada pelaksana program maupun kelompok sasaran maka akan menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan program tersebut.

Program *urban farming* ini telah berjalan selama tiga tahun dan mengenai maksud, tujuan dan output yang ingin dicapai dari program ini masih tetap seperti pada saat perumusan program, yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat kota dan pemanfaatan lahan kosong yang ada di sekitar perkotaan. Namun disini dapat dilihat adanya perkembangan mengenai sasaran program yang dulunya masih hanya untuk kelompok-kelompok masyarakat dan PKK, tapi sekarang juga bisa untuk pribadi atau perorangan rumah tangga dan tentunya mereka juga akan mendapatkan pembinaan dan pendampingan yang sama seperti kelompok-kelompok. Jadi dapat dikatakan bahwa program ini tetap konsisten dan tidak mengalami perubahan sewaktu-waktu.

Secara keseluruhan, faktor komunikasi dalam pelaksanaan program *urban farming* ini berjalan dengan baik dan efektif dalam tahapan tertentu. Namun juga terdapat beberapa hambatan yang ditunjukkan dalam tahapan program yang juga membutuhkan adanya komunikasi yang berjalan baik didalamnya. Dimana dalam tahapan monitoring dan evaluasi program, masih kurang terkomunikasikannya evaluasi atas pencapaian hasil program *urban farming* yang telah diimplementasikan. Komunikasi yang ditunjukkan disini, aktor pembuat program tidak memiliki data pencapaian hasil program secara keseluruhan dan masyarakat sebagai kelompok sasaran juga banyak yang tidak memberikannya, dengan alasan bahwa ini program pemberdayaan masyarakat jadi keputusan ada di tangan mereka. Hal ini dikarenakan kurangnya monitoring dari pelaksana program, yang seharusnya data tersebut akan dijadikan bahan evaluasi perkembangan program *urban farming* dan keberlanjutannya.

Melihat berbagai hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi program *urban farming* ini telah terbentuk dengan baik namun masih belum efektif.

2. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam keefektifan pelaksanaan program. Karena walaupun sebagai apapun suatu program itu dibuat tapi tidak didukung dengan adanya sumberdaya yang memadai tetap saja akan sangat sulit untuk diimplementasikan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari George C. Edward III yang menegaskan dan meyakini bahwa faktor sumberdaya ini sangat signifikan terhadap proses pelaksanaan program tersebut. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa macam sumberdaya yang mendukung program *Urban farming*.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan program. Sumberdaya manusia ini harus tercukupi secara kuantitas (jumlah) maupun kualitas (keahlian).

Sumberdaya manusia juga harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, pelaku program tidak hanya cukup mengetahui informasi mengenai cara melaksanakan program tersebut saja, tapi juga harus mengetahui arti penting mengenai kepatuhan pihak lain yang terlibat terhadap peraturan dan pengaturan yang berlaku.

Sumberdaya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program *Urban farming* ini adalah dari

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang bertanggungjawab pada program tersebut, lalu yang memahami informasi pelaksanaan di lapangan yaitu tim penyuluh atau pendamping dari Badan Pelaksana Penyuluhan itu sendiri. Selain itu, pihak lain yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu dari TP PKK dan Dinas Pertanian, adapula dari sektor privat perusahaan seperti Petrokimia, Pertamina dan PJB melalui CSR yang diberikan. Setiap sumberdaya atau aktor tersebut telah mengetahui peran dan tugasnya sendiri-sendiri.

Aktor pelaksana program atau sumberdaya manusia secara kualitas dari segi keahlian dan kemampuan cukup baik, dengan adanya pemilihan para pelaksana penyuluh pertanian sebagai pendamping kelompok sasaran di masyarakat yang diseleksi dan dipilih sesuai kriteria yang ditentukan. Secara kualitas para pelaksana ini mampu menguasai teknik pemberdayaan masyarakat, memiliki pemahaman mengenai program *urban farming*, dan mampu berkoordinasi secara horizontal maupun vertikal dengan dinas lain yang terkait serta sektor privat perusahaan. Namun, ketersediaan atau kecukupan aktor pelaksana program atau sumberdaya manusia dari Badan Pelaksana Penyuluhan ini terutama yang bertindak sebagai penyuluh pertanian di lapangan masih kurang memadai. Hal ini terjadi di hampir semua tim penyuluh pertanian yang ditempatkan di beberapa titik binaan atau kelompok kerja masyarakat.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ketersediaan sumberdaya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program *urban farming* ini masih kurang memadai dari segi kuantitas atau kecukupan sumberdaya, meskipun secara kualitas atau keahlian sumberdaya masih mampu. Namun dengan kurangnya kuantitas ini dapat mempengaruhi efektifitas implementasi dan tujuan yang ingin dicapai program ini.

b. Sumberdaya Anggaran

Selain sumberdaya manusia, salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan program adalah sumberdaya dana yang diperlukan untuk biaya operasionalisasi pelaksanaan program. Terbatasnya anggaran yang tersedia dapat menimbulkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Kondisi seperti ini menyebabkan kurang optimalnya tugas dan fungsi para pelaku program, karena mereka tidak mendapatkan insentif sesuai dengan yang diharapkan yang akhirnya dapat menyebabkan kegagalan program.

Bahwa dalam pelaksanaan program *urban farming* ini sumber dana utama berasal dari APBD

Kabupaten Gresik. Dana tersebut oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipergunakan sebagai dana pembinaan kepada para aktor pelaksana dan juga kelompok sasaran, serta pelatihan bagi masyarakat kelompok sasaran.

Adapun temuan hasil penelitian lain, menunjukkan bahwa sumberdaya dana lain muncul berasal dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian itu sendiri dan ada pula yang berasal dari bantuan CSR perusahaan PJB dan Pertamina yang membantu berupa dana atau uang. Sumberdaya dana tersebut yang nantinya akan dipergunakan untuk modal dalam melaksanakan budidaya dan pemeliharaan tanaman maupun buah-buahan oleh kelompok sasaran.

Berdasarkan uraian sumber dana tersebut dapat diinterpretasikan bahwa ketersediaan anggaran atau dana dalam pelaksanaan program *urban farming* sudah memadai dan sangat berpengaruh bagi kelangsungan program. Penggunaan dana untuk operasionalisasi program, pembinaan dan penyuluhan.

c. Sumberdaya Fasilitas

Sumberdaya fasilitas merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi pelaksanaan program yang dapat berupa gedung, tanah, dan sarana lainnya yang berhubungan dengan program tersebut dan memberikan pelayanan dalam implementasi program. Menurut George Edwards III, dengan terbatasnya jumlah fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program, maka akan menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan. Karena dengan terbatasnya fasilitas ini, akan terjadi kesulitan dalam mencari informasi yang akurat, tepat, handal dan dapat dipercaya dan akan merugikan pelaksanaan akuntabilitas.

Fasilitas yang dimaksud dalam pelaksanaan program *urban farming* yang dibutuhkan seperti tersedianya lahan kosong, bantuan bibit tanaman, pupuk dan sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan *urban farming*.

Berdasarkan tujuan program *urban farming* ini yaitu pemanfaatan lahan kosong yang ada di perkotaan, tentu saja fasilitas utama yang dibutuhkan disini adalah lahan kosong atau lahan sempit seadanya.

Temuan lain menunjukkan bahwa sumberdaya fasilitas lain berasal dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan anggota tim penggerak PKK Kabupaten Gresik serta dari bantuan CSR oleh perusahaan Petrokimia. Bantuan yang diberikan oleh Petrokimia sebagai sektor privat ini melalui CSR yang berupa pupuk dan juga bibit-bibit tanaman yang digunakan kelompok sasaran dalam melakukan

pembudidayaan. Fasilitas lain diberikan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dari anggaran mereka untuk fasilitas seperti polybag atau karung, dan penyediaan peralatan untuk bercocok tanam. Selain itu terdapat juga fasilitas yang disediakan sendiri oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran dengan memanfaatkan limbah atau barang yang sudah tidak dipakai lagi.

Berdasarkan berbagai uraian mengenai sumberdaya fasilitas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan fasilitas dan peralatan dalam pelaksanaan program *urban farming* ini telah memadai dan berpengaruh untuk operasionalisasi pelaksanaan program.

d. Sumberdaya Informasi dan Kewenangan

Sumberdaya informasi merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan program. Dimana informasi yang relevan dan cukup tentang arah, maksud dan tujuan suatu program dapat mengurangi kesalahan para pelaksana dalam menginterpretasikan cara terbaik dalam melaksanakan program tersebut. Informasi juga penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi agar mereka mau menjalankan dan mematuhi tugas dan tanggungjawabnya. Kewenangan juga merupakan sumberdaya lain yang berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan program. Kewenangan diperlukan untuk menjamin dan meyakinkan bahwa program yang akan dilakukan sesuai dengan yang dikehendaki oleh semua pihak yang terkait.

Bahwa sumberdaya informasi mengenai program *urban farming* pada awalnya dimiliki oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang merumuskan mengenai program ini. Jadi stakeholder utama atau policy maker disini adalah dari Badan Pelaksana Penyuluhan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan lahan kosong di perkotaan sebagai akibat menurunnya petani di pedesaan dan berkembangnya industri di perkotaan.

Kemudian informasi tersebut diturunkan kepada pemangku jabatan fungsional penyuluh pertanian di Badan Pelaksana Penyuluhan sebagai pelaksana program agar dapat diimplementasikan. Informasi diberikan secara mendetail mengenai arti, maksud, tujuan dan sasaran program serta tahapan yang akan dilakukan. Untuk masalah kewenangan aparat pelaksana program *urban farming* ini sudah dilakukan dengan baik dan dibagi sesuai bidangnya. Badan Pelaksana Penyuluhan sebagai aktor utama program dan diikuti oleh Dinas Pertanian dan TP PKK yang membantu dalam pendampingan dan penyuluhan di lapangan. Serta sektor privat perusahaan membantu dalam bentuk CSR berupa dana dan fasilitas.

Melihat berbagai uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sumberdaya informasi dan kewenangan yang dimiliki dalam melaksanakan program *urban farming* ini cukup baik dan relevan dengan apa yang dicapai.

3. Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan pelaku program untuk melaksanakan program dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Disposisi akan muncul diantara pelaku program yang manakala tidak hanya menguntungkan organisasi namun juga diri sendiri. Setiap pelaku program akan mengetahui bahwa program tersebut akan menguntungkan organisasi dan dirinya, ketika seseorang cukup akan pengetahuan dan sangat mendalami dan memahaminya.

Menurut Van Meter dan Van Horn, terdapat tiga macam elemen respons yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu program, yaitu: Pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap program; Arah respon para pelaku program; dan Intensitas terhadap program. Ketiga elemen ini akan dijelaskan bersamaan dengan hasil penemuan yang ada di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dari para pelaksana program *urban farming* ini menerima apa yang menjadi keputusan dari Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian untuk membuat program seperti ini. Karena dinilai dengan program *urban farming* ini dapat mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi di Gresik dan mampu meningkatkan nilai ekonomis masyarakat kota.

Para pelaksana program disini juga tidak hanya sekedar menerima program tersebut, namun dalam faktanya mereka sebagai aktor utama dalam menjalankan program ini memiliki kemauan dan komitmen yang tinggi.

Sikap pelaksana yang ditunjukkan dalam program *urban farming* ini cukup baik. Mereka paham dan mengetahui bahwa program ini merupakan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan lahan kosong yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lingkungan perkotaan yang indah, bersih dan nyaman. Pemahaman tersebut secara tidak langsung mengarahkan pada respon mereka yang mendukung pelaksanaan program tersebut, yang ditunjukkan dengan dukungan, kesediaan dan kemampuan untuk selalu melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk mencapai kesatuan gerak langkah dan keefektifan program.

Jadi berdasarkan uraian hasil penelitian, maka dapat diinterpretasikan bahwa disposisi atau sikap para pelaksana program disini menunjukkan tanggapan yang positif dan baik mengenai program *urban farming*. Dan hal ini juga didukung dengan respon mereka dalam melaksanakan program untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

4. Struktur Birokrasi

Peranan lembaga atau institusi sebagai birokrasi pelaksana dalam proses pelaksanaan program memang tidak dapat dilepaskan, karena ketika suatu program telah diputuskan, maka dibutuhkan suatu sistem untuk melaksanakan program tersebut, sistem inilah yang disebut sebagai birokrasi. Struktur birokrasi dalam penelitian ini akan mengacu pada pendapat George C. Edward III, dimana menurut Edward, struktur birokrasi dipandang sebagai terdapatnya suatu standart operating procedures (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program atau prosedur-prosedur rutin yang mengatur mekanisme kerja proses pelaksanaan kebijaksanaan.

Keberhasilan pelaksanaan program yang kompleks membutuhkan adanya kerjasama yang baik dari banyak orang. Oleh karena itu, fragmentasi organisasi dapat merintangangi koordinasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program yang kompleks.

Bahwa dalam program *urban farming* ini diatur dalam Perda kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang didalamnya menjelaskan mengenai struktur organisasi, ketentuan dan tugas yang diemban oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Dalam pasal 42(A) Perda tersebut juga menyebutkan mengenai pelaksanaan tugas dalam membantu Bupati untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Selain dari Perda tersebut, juga disebutkan dalam Perbup Nomor 10 Tahun 2012 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Maka dalam upaya menindaklanjuti program atau Perda tersebut serta melanjutkan SOP yang mengatur maka Badan Pelaksana Penyuluhan ini membuat program *urban farming* dan menunjuk aparat pelaksana program yang mendukung dan melaksanakan program ini.

Dalam struktur birokrasi yang tersusun dan terorganisir berdasarkan mekanisme dan sistem organisasi program *urban farming*, maka yang menjadi penanggungjawab utama dari pelaksanaan program adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten

Gresik. Kepala Badan dan bagian Tim Pembina program dalam hal ini adalah sebagai pusat informasi dan koordinator dalam pelaksanaan program *urban farming*.

Sedangkan Tim Pelaksana dan Teknis program berperan dan bertugas sebagai pelaksana program dan melakukan pendampingan terhadap kelompok sasaran di lapangan. Tim Pelaksana dan Teknis ini ditunjuk langsung oleh Kepala Badan. Selain itu, aparat pelaksana program yang membantu di lapangan juga ada yang berasal dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan serta TP PKK Kabupaten Gresik.

Dapat diinterpretasikan bahwa struktur birokrasi yang mengatur pelaksanaan program *urban farming* ini sangat jelas mekanisme dan sistemnya. Pembagian tugas pokok dan fungsi setiap aktor yang terlibat juga jelas dan terorganisir rapi, sehingga pelaksanaan dan pengawasan program berjalan dengan baik, diikuti dengan tanggungjawab yang harus dipegang. Selain itu peran aparat pelaksana di lapangan seperti tim penyuluh sudah relatif cukup baik, karena telah melakukan proses pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Namun kendala yang sedikit terjadi disini yaitu tanggungjawab pelaksana program kepada pembuat program kurang baik, dimana mengenai data pencapaian hasil program dalam tahapan evaluasi kurang lengkap, sehingga mengalami kebingungan dalam menetapkan perkembangan yang terjadi dan keberlanjutan program *urban farming* ini.

5. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Pada variabel ini mencakup sumberdaya sosial ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program. Melihat kondisi dalam penelitian ini, maka sejauh manakah masyarakat sekitar yang menjadi kelompok sasaran dalam memberikan dukungan bagi pelaksanaan program. Dukungan kelompok sasaran meliputi dua hal, yaitu penolakan dan dukungan. Dukungan kelompok sasaran akan merosot jika suatu program membebankan ongkos pada mereka, hal ini karena dukungan masyarakat pada suatu program berkorelasi dengan sumber keuangan ataupun posisi startegis dalam sektor ekonomi secara keseluruhan.

Dapat dijelaskan bahwa respon dan dukungan dari masyarakat sebagai kelompok sasaran itu positif dan banyak yang ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program *urban farming* didaerahnya. Karena jika dilihat memang program *urban farming* ini sangat menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri, apalagi mereka tidak dibebankan dalam hal biaya produksi atau prosesnya.

Masyarakat hanya dibebankan dalam hal waktu dan mungkin pekerjaan utama mereka.

Respon masyarakat sampai sekarang sudah sampai pada pengembangan sendiri program *urban farming*. Jadi sebagian masyarakat swadaya sudah mampu mengembangkan program yang sebelumnya dibina oleh pemerintah, dengan menambah jumlah komoditi tanaman yang dibudidaya, menambah luas lahan sehingga dapat ditanami lebih banyak lagi jumlah tanaman, ada yang mengembangkan dari proses produksi, perawatan, pemasaran dan pendistribusian sampai pada proses pengolahannya.

Dukungan kelompok sasaran juga ditunjukkan dengan banyaknya respon dari masyarakat yang menerima program *urban farming* ini, yang ditunjukkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam proses pelatihan program *urban farming* dan juga dalam kunjungan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian untuk melaksanakan pembinaan dan pendampingan program.

Meskipun sebenarnya dalam tahapan awal proses sosialisasi sedikit mengalami kendala dalam mengumpulkan dan mengajak masyarakat agar mau mendengarkan penjelasan dari pelaksana program.

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dukungan kelompok sasaran sangat baik. Walaupun ada kendala di awal tahapan sosialisasi program *urban farming*. Namun dengan ketekunan, ketelatenan dan kesabaran dari aparat pelaksana program, pelaksanaan program *urban farming* dapat tetap berjalan dan berkembang hingga sekarang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program *Urban farming* yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Gresik ini telah berjalan cukup baik namun belum efektif. Hal ini terlihat dari proses atau tahapan dalam pelaksanaan secara keseluruhan, yaitu meskipun telah berjalan dan berdampak positif dalam pelaksanaannya, namun terdapat beberapa proses yang belum maksimal. Pelaksanaan program *urban farming* yang dilaksanakan ini meliputi proses persiapan program, sosialisasi kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran, perencanaan program, pelaksanaan program *urban farming* serta monitoring dan evaluasi program. Hal ini juga terlihat dari beberapa indikator:

1. Komunikasi

Dalam dimensi transformasi ini, berdasarkan hasil penelitian informasi yang dipegang oleh jabatan teknis di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian

disampaikan kepada jabatan fungsional Badan Pelaksana Penyuluhan sebagai tim penyuluh di lapangan yang dibantu oleh dinas terkait dan juga TP PKK Gresik. Komunikasi instansi secara internal maupun eksternal yang terkait dan antara instansi dengan sektor privat yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung juga berjalan cukup baik.

Pada dimensi kejelasan, berdasarkan hasil penelitian dipilih pelaksana yang mampu memahami dan mentransformasikan maksud dan tujuan program dengan jelas. Para pelaksana program disini memadukan gerak langkah dan persepsi mengenai arti, maksud dan tujuan program *urban farming* agar dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam dimensi konsistensi, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa program *urban farming* ini telah berjalan selama tiga tahun dan mengenai maksud, tujuan dan output yang ingin dicapai dari program ini masih tetap sama. Sehingga masih tetap konsisten dan tidak berubah.

Secara keseluruhan, faktor komunikasi dalam pelaksanaan program *urban farming* ini berjalan dengan baik dan efektif dalam tahapan tertentu. Namun masih terdapat hambatan dalam monitoring dan evaluasi kebijakan, dimana aktor pembuat program tidak memiliki data pencapaian hasil program secara keseluruhan, sehingga menunjukkan masih kurang terkomunikasikannya evaluasi atas pencapaian hasil program *urban farming* yang telah diimplementasikan.

2. Sumberdaya

Dalam sumberdaya manusia, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor pelaksana program secara kualitas dari segi keahlian dan kemampuan cukup baik, dengan adanya seleksi, pemilihan dan pelatihan sesuai kriteria yang ditentukan. Namun, secara kuantitas ketersediaan atau kecukupan aktor pelaksana program atau sumberdaya manusia dari Badan Pelaksana Penyuluhan ini terutama yang bertindak sebagai penyuluh pertanian di lapangan masih kurang memadai. Meskipun secara kualitas atau keahlian sumberdaya masih mampu. Namun dengan kurangnya kuantitas ini dapat mempengaruhi efektifitas program dan tujuan yang ingin dicapai kebijakan ini.

Mengenai sumberdaya anggaran atau dana, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sumber dana utama berasal dari APBD Kabupaten Gresik. Dana tersebut digunakan untuk dana pembinaan dan pelatihan kepada para aktor pelaksana dan kelompok sasaran. Adapun sumber dana lain berasal dari bantuan CSR oleh PJB dan Pertamina, dana tersebut dipergunakan untuk modal dalam pelaksanaan

program dalam hal ini melakukan budidaya dan pemeliharaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketersediaan anggaran dana sudah memadai dan sangat berpengaruh bagi kelangsungan program.

Dalam sumberdaya fasilitas, yang dibutuhkan disini adalah tersedianya lahan kosong, bibit tanaman, pupuk dan sebagainya. Sumberdaya fasilitas berasal dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berupa penyediaan peralatan bercocok tanam seperti polybag atau karung dan lainnya, dan anggota tim penggerak PKK Kabupaten Gresik berupa tanaman untuk budidaya, serta berasal dari bantuan CSR oleh Petrokimia berupa pupuk dan juga bibit tanaman untuk budidaya. Sehingga mengenai ketersediaan fasilitas dan peralatan dalam membantu pelaksanaan program *urban farming* ini sudah memadai dan membantu untuk operasionalisasi pelaksanaan program.

Dalam sumberdaya informasi dan kewenangan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya informasi mengenai program *urban farming* dimiliki oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai stakeholder utama disini untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan lahan kosong di perkotaan. Kemudian informasi tersebut disampaikan kepada pemangku jabatan fungsional sebagai pelaksana program agar dapat dilaksanakan. Untuk masalah kewenangan, aparat pelaksana kebijakan *urban farming* ini sudah dilakukan dengan baik dan dibagi sesuai bidangnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumberdaya informasi dan kewenangan yang dimiliki dalam melaksanakan program *urban farming* ini cukup baik dan relevan dengan apa yang dicapai.

3. Disposisi

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman aparat pelaksana program *urban farming* sudah baik. Pemahaman terhadap program tersebut secara tidak langsung mengarahkan respon para pelaksana untuk mendukung dan menerima program *urban farming* ini, hal tersebut ditunjukkan dengan kemauan, ketersediaan dan kemampuan untuk melaksanakan program dengan koordinasi dan komunikasi untuk mencapai keberhasilan dan pencapaian tujuan program.

Para pelaksana program sebagai aktor utama dalam menjalankan program, mereka menunjukkan kemauan dalam menjalankan program dengan melakukan pendampingan dan penyuluhan terhadap kelompok sasaran. Sehingga dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana program *urban farming* ini menunjukkan tanggapan

yang baik dan positif dengan didukung oleh respon dalam pelaksanaan program demi tercapainya tujuan yang diharapkan.

4. Struktur Birokrasi

Selain Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik, dalam pelaksanaan program *urban farming* juga melibatkan lembaga lain dan sektor privat dalam membantu pelaksanaannya. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa instansi-instansi yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dan TP PKK Kabupaten Gresik. Selain itu dari sektor privat terdapat perusahaan PJB, Petrokimia dan Pertamina.

Adapun mekanisme yang terjadi dalam program *urban farming* ini yaitu dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai aktor utama program, dimulai dari tim pelaksana atau penyuluh program yang bertanggungjawab kepada tim pembina atau Kepala Badan yang ada di Badan Pelaksana Penyuluhan, kemudian dari Kepala Badan dan tim pembina akan dipertanggungjawabkan kepada Bupati.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi yang mengatur pelaksanaan program *urban farming* ini sangat jelas mekanisme dan sistemnya. Pembagian tugas pokok dan fungsi setiap aktor yang terlibat juga jelas dan terorganisir rapi. Sehingga pelaksanaan dan pengawasan program berjalan dengan baik, diikuti dengan tanggungjawab masing-masing aktor. Namun terdapat sedikit kendala yaitu tanggungjawab pelaksana program kepada pembuat kebijakan kurang baik, dimana mengenai data pencapaian hasil program dalam tahapan evaluasi kurang lengkap, sehingga mengalami kebingungan dalam menetapkan perkembangan yang terjadi dan keberlanjutan program *urban farming* ini.

5. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa respon dan dukungan dari masyarakat sebagai kelompok sasaran sangat positif dan banyak yang ikut serta berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program *urban farming* di kelompok maupun daerahnya.

Hal ini dapat dilihat dengan semakin berkembangnya pelaksanaan *urban farming* di daerah-daerah dan semakin banyaknya minat dari masyarakat yang ingin mengikuti program ini. Selain itu juga banyak masyarakat swadaya yang ingin mengembangkan sendiri budidaya yang telah dikembangkannya sebelumnya.

Dukungan kelompok sasaran juga yang menerima program *urban farming* ini, ditunjukkan

dengan keikutsertaan masyarakat dalam proses pelatihan program *urban farming* dan juga dalam kunjungan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian untuk melaksanakan pembinaan dan pendampingan program. Masyarakat disini mendapatkan banyak ilmu baru mengenai cara bercocok tanam modern, mulai dari memproduksi, merawat, memasarkan, mendistribusikan sampai mengolah hasil budidaya.

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dukungan kelompok sasaran sangat baik.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran pada pelaksanaan program *urban farming* di Kabupaten Gresik, antara lain:

1. Kepada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, mengenai sumberdaya yang ada seharusnya lebih ditingkatkan lagi secara kuantitas dan kualitas, agar dalam pelaksanaannya lebih efektif untuk program *Urban farming*.
2. Kepada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlunya komunikasi yang terjalin antar aktor pelaksana dan pembuat program agar dalam pelaksanaan tidak terjadi kesalahpahaman dan miss communication diantara struktur organisasi dalam *Urban farming*.
3. Kepada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlunya laporan hasil perkembangan program *Urban farming* terkait data pencapaian program yang valid, untuk dapat mengetahui seberapa jauh perkembangan yang sudah dicapai setelah adanya kebijakan *Urban farming* agar dapat menentukan keberlanjutan program.
4. Kepada peneliti selanjutnya, sebagai perkembangan dan kesempurnaan penelitian pelaksanaan program terutama di bidang *Urban farming*, maka peneliti selanjutnya dapat melakukan pendalaman penelitian dengan fokus pada satu atau beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kemudian dikaji secara mendalam dan mencari faktor dominan yang mengakibatkan pelaksanaan program itu berhasil atau gagal, karena pada dasarnya pelaksanaan itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Butler, L. & D.M. Moronek. 2002. *Urban and Agriculture Communities: Opportunities for Common Ground*. Ames Iowa: Council for Agricultural Science and Technology.
- Haryanto, Tri. 2009. *Ekonomi Pertanian*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Irdrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Islamy, Irfan. 1994. *Prinsip-prinsip Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Juhadi. 2007. *Pola-pola Pemanfaatan Lahan dan Degradasi Lahan Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan*. Jurnal Geografi. Vol. 4. No. 1/Januari. Hal. 11.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gresik.
- Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
- Sabatier, Dennis dan Mazmanian. 1975. *Implementation and Public Policy*. Jakarta.
- Smith, Jac, Ratta, Annu and Nasr, Joe. 1996. *Urban Agriculture: Food, Jobs, and Sustainable Cities*. Habitat II Series. New York: UNDP.
- Thoha, Miftah. 1993. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- Wahab, Solichin Abdul. 1990. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.